

Respon Manajemen Program JPS, Beasiswa dan DBO terhadap Pengungsi Maluku di Manado dan Bitung

Hetty Sompie Geru
(*Universitas Samratulangi*)

Pendahuluan

6 Nopember 1999 masyarakat Sulut dikejutkan dengan tibanya sejumlah pengungsi dari Ternate di pelabuhan Bitung dengan KM Atalia dan KM Kota Teratai. Pengungsi pertama berjumlah + 250 orang, tiba dengan kapal laut. Oleh Pemda pengungsi ditempatkan di aula Gereja Sentrum Manado.

Krisis yang menyebabkan merebaknya pengungsi tersebut, tak dapat dipisahkan dari krisis yang menyebabkan kerusuhan dan pertikaian yang terjadi di Ambon. Kerusuhan Ambon telah berlangsung hampir 1 tahun pada saat kejadian di Maluku Utara pecah dan berbuntut gelombang pengungsi di Sulut yang telah mencapai 17.941 orang saat ini.

Meskipun kerusuhan di Ternate merupakan kelanjutan

kerusuhan di Ambon, tetapi penyebabnya ada sedikit perbedaan, meskipun polanya ada persamaan.

Jika pengungsi yang keluar dari Ambon sebagian besar pendatang yang beragama Islam, maka pengungsi yang keluar dari Ternate (ke Manado dan Bitung) sebagian besar adalah pendatang dari Ternate (orang Minahasa, Sangir dan Ambon) yang beragama Kristen.

Penyebab krisis di Maluku Utara dimulai dari adanya dikotomi pendatang dan penduduk asli di lokasi transmigrasi lokal Kecamatan Kao. Lebih 20 tahun lalu sebuah gunung di pulau Makian (barat Halmahera, selatan Ternate) dikuatirkan akan meletus sehingga penduduk dipindahkan oleh pemerintah ke lokasi pemukiman di kecamatan Kao yang kemudian bernama desa Malifut. Lokasi ini subur dan ternyata pemukiman Malifut berkembang pesat meliputi lokasi yang makin besar.

Sementara itu di daerah tersebut ternyata ada deposit emas yang kemudian dikelola oleh usaha tambang dari Australia yang mempekerjakan sebagian besar penduduk Malifut dan hanya sedikit penduduk Kao. Tidak ada yang menyadari bahwa kemakmuran di Malifut dan usaha tambang emas melahirkan rasa "cemburu" dan kesenjangan jarak antara penduduk asli dan pendatang.

Pada saat Maluku Utara ingin menjadi provinsi, Malifut akan dimekarkan oleh Pemda sebagai kecamatan tanpa berkonsultasi dengan suku Kao. Mereka akan menamakan kecamatan tersebut Kecamatan Makian Daratan. Beberapa desa penduduk Kao (Islam dan Kristen) di Malifut tidak menerima pemekaran dan penamaan tersebut yang berbau kepentingan suku. Kejadian pemicu kerusuhan adalah pesta anak muda pekerja tambang yang mengakibatkan cederanya pemuda Kao. Merasa jumlahnya kecil (di usaha tambang) penduduk Kao pergi mengajak saudara dan teman-temannya suku Kao (dari kec. Kao) menyerbu Malifut (suku Makian) yang kemudian dibalas dengan penyerangan suku Makian ke desa suku Kao di Malifut.

Merasa terpojok gelombang besar suku Kao menyerbu Malifut dan membunuhanguskan desa-desa Makian di Malifut. Pada kerusuhan pertama ini tidak ada pembakaran gedung ibadah (bukti bahwa mulanya bukan pertikaian agama, melainkan suku)

Suku Makian mengungsi ke Ternate. Dan mulai tanggal 21 September 1999 Kota Ternate kedatangan pengungsi Makian-Malifut. Beredar selebaran gelap dari sinode gereja Halmahera yang berisi hasutan kepada umat Kristen supaya membunuh umat islam (kemudian ternyata selebaran ini palsu, tidak ada cap dan nama sinode gereja . Surat ini dibantah keras oleh pihak gereja). Selebaran ini memicu kebencian agama Islam kepada agama Kristen dan terjadilah pembakaran rumah ibadah, pembunuhan umat kristen dan pengusiran pendatang yang beragama kristen keluar dari Ternate.

Jadi penyebab kerusuhan adalah adanya dikotomi pendatang dan penduduk asli pada trasmigrasi lokal suku Makian di kec. Kao. Integrasi pendatang dua suku (Makian-

Kao) tidak pernah tuntas meskipun telah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Dengan kata lain :

'Ke-kami-an belum menjadi ' ke-kita-an.

Selain itu perlu ditelusuri mengapa ajaran agama yang seharusnya menghormati keutuhan dan keselamatan ciptaan, malahan berbuntut saling menghancurkan. Apa yang salah dari ajaran agama (Kristen maupun Islam ?).

Pengungsi di Sulut masih terus berdatangan sampai survey ini berakhir, pengungsi Morotai sebanyak 2 keluarga baru saja tiba ! Jumlah pengungsi mendekati 20.000 jiwa, belum termasuk yang datang di luar rombongan (keluarga mampu).

Lokasi dan jumlah pengungsi

Sampai dengan bulan Pebruari 2000 jumlah pengungsi asal Maluku Utara adalah : 17.941 orang. Tanggungan pemerintah Daerah berjumlah 6157 orang terdiri atas 3157 laki-laki dan 3045 perempuan, yang tersebar sbb :

Tabel 1 (Lampiran I):

Lokasi dan Jumlah Pengungsi Maluku di Sulawesi Utara

Siswa pengungsi

Sekolah yang menampung siswa pengungsi

Sampai saat ini belum diperoleh data jumlah siswa pengungsi. Kanwil Depdiknas Propinsi Sulut baru mulai mendata jumlah siswa pengungsi.

Sekolah-sekolah yang dipilih sebagai lokasi survey adalah sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, yaitu :

Selain itu sekolah-sekolah yang menerima siswa pengungsi antara lain :

SLTP Pertiwi Manado, SDN Girian, SLTP 13 Manado.

Siswa-siswa pengungsi pada umumnya tidak mempunyai seragam sehingga pakaian yang digunakan adalah pakaian apa adanya saja. Demikian juga dengan sepatu dan alat tulis yang serba minim. Kepala Sekolah, Guru dan siswa di semua sekolah memberikan respon positif kepada siswa pengungsi yaitu dengan sukarela

berupaya mencari seragam dan sepatu yang masih layak untuk digunakan dan juga memberikan kue/jajanan bagi anak-anak pengungsi atau mengumpulkan uang melalui dompet peduli pengungsi dan dibagikan kepada mereka.

Siswa pengungsi belum mendapat jatah untuk menerima beasiswa karena alokasi beasiswa sudah dilaksanakan sebelum pengungsi datang.

Siswa pengungsi pada umumnya belum sempat sarapan saat berangkat sekolah karena dapur umum belum dibuka pada pagi hari sebelum mereka berangkat ke sekolah. Beberapa orang tua berupaya untuk memasak makanan untuk anak-anak yang akan berangkat ke sekolah dengan menggunakan biaya mereka sendiri, padahal keuangan mereka juga sudah semakin menipis karena sebagai pegawai negeri mereka belum menerima gaji, dan sebagai pekerja swasta pekerjaan mereka tidak tetap.

Jatah beasiswa sulit untuk dialihkan ke siswa pengungsi oleh karena jumlah siswa setempat yang kurang mampu lebih banyak dari jatah beasiswa yang diperoleh sekolah.

Keadaan siswa pengungsi di tempat penampungan

Para pengungsi yang ditampung di tempat penampungan mendapat makanan dari biaya Pemerintah Daerah. Menurut Drs. A.K. Lapadengan sedikitnya setiap hari Pemda mengeluarkan Rp. 10.000.000 sampai Rp.15.000.000 untuk mobilisasi 6157 orang pengungsi. Dan dari Pemda sendiri sudah mulai kewalahan karena keuangan/kas Pemda juga tidak mencukupi sedangkan sumbangan untuk para pengungsi sudah berkurang.

Di tiap lokasi penampungan terdapat dapur umum. Para pengungsi memasak untuk 3 kali makan yaitu makan pagi, makan siang dan makan malam, tetapi jika sumbangan/dana berkurang, mereka hanya mengkonsumsi supermi sebagai makanan utama.

Anak-anak pengungsi yang bersekolah biasanya tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah karena dapur umum belum buka. Oleh masing-masing orangtua, diupayakan untuk memasak bagi anak-anak dengan

menggunakan biaya sendiri yang masih tersisa pada mereka.

Pada umumnya anak-anak pengungsi tidak menggunakan pakaian seragam yang memadai. Pakaian yang dikenakan hanya ala kadarnya, begitu juga dengan sepatu dan alat tulis menulis yang sangat minim.

Anak-anak belajar di penerangan lampu yang kurang dan di tengah-tengah barak penampungan yang hiruk pikuk, sehingga mereka tidak dapat belajar dengan baik.

Respon manajemen program JPS beasiswa dan DBO terhadap pengungsi

Sekolah-sekolah yang menerima siswa pengungsi ternyata telah memberikan respon positif terhadap para siswa pengungsi dalam bentuk memberikan bantuan seragam sekolah, sepatu, alat-alat tulis dan juga uang jajan/transpor yang diberikan secara pribadi. Komite Sekolah belum memberikan respon terhadap pengungsi. Hanya ada satu sekolah (SMUN 1 Girian) yang dengan tegas menyatakan bahwa dana DBO sebagian telah digunakan untuk membiayai buku kontrol siswa (termasuk untuk pengungsi) sedangkan sekolah-sekolah lain yang menerima DBO sangat terikat pada ketentuan yang ada dalam proposal yang peruntukannya bukan untuk siswa pengungsi. Kepala Sekolah SLTP 13 akan mengusulkan agar DBO tahap kedua dapat juga dialokasikan bagi anak pengungsi, tetapi hal ini harus dilakukan secara arif karena jumlah anak kurang mampu yang belum menerima beasiswa cukup banyak. Komite Sekolah mendapat kesulitan untuk mengalihkan bantuan kepada siswa pengungsi oleh karena siswa-siswa kurang mampu yang tidak mendapat beasiswa merasa keberatan jika tidak mendapat bagian (kecemburuan sosial). Siswa penerima beasiswa tidak bersedia jika jatahnya dialihkan kepada pengungsi karena dia sendiri sangat membutuhkan.

Kesimpulan dan rekomendasi

1. Pengungsi Maluku yang datang ke Manado disebabkan oleh :

- a. Adanya kesenjangan sosial antara penduduk transmigran lokal Makian Malifut dan penduduk asli Kao dan tidak tuntasnya integrasi antar etnis meskipun telah bermukim selama kurang lebih 20 tahun. Penduduk asli (Kao) tetap menganggap dirinya "kami" dan belum merasa menjadi "kita" bersama dengan Makian-Malifut, ("kekamian" belum menjadi "kekitaan") sehingga terjadi kerusuhan Kao-Malifut. Kerusuhan ini berlanjut di Ternate dimana mereka memperlakukan penduduk pendatang di Ternate bukan menjadi bagian dari masyarakat mereka/"kita", sehingga terjadi pengusiran besar-besaran pada pendatang di Ternate yang pada umumnya beragama Kristen. Keadaan tersebut berlangsung di seluruh desa, dimana penduduk asli desa yang mayoritas beragama Islam mengusir dan menganiaya pendatang

yang beragama Kristen, begitu juga sebaliknya, mayoritas penduduk yang beragama Kristen mengusir dan menganiaya penduduk yang beragama Islam.

- b. Penyebab pemicu kerusuhan lainnya adalah adanya provokasi surat edaran Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang intinya mengajak orang Kristen memusuhi/memerangi umat Islam. Hal ini dibantah pihak gereja dengan membuktikan bahwa surat itu palsu.
 - c. Hal lain yang menyebabkan kerusuhan tersebut adalah pemahaman yang sangat dangkal terhadap ajaran agama yang seharusnya mengajarkan kasih, kerukunan dan keutuhan ciptaan, pada kenyataannya saling menghancurkan.
2. Manajemen lokal SGP baik Komite Sekolah, Komite Kecamatan, Komite kabupaten/Kota dan Komite Propinsi belum memberikan respon terhadap pengungsi khususnya siswa dan guru karena alokasi beasiswa dan DBO telah direncanakan sebelum para pengungsi tiba. Pada umumnya bantuan yang diberikan adalah dana pribadi guru, murid yang rela membantu atau dana rutin sekolah. Umumnya Kepala Sekolah mengeluh tentang masalah ini karena untuk operasional sekolah saja sudah tidak mencukupi lagi apalagi ditambah dengan bantuan untuk pengungsi. Dana beasiswa dan DBO sulit untuk dialokasikan kepada siswa dan guru pengungsi karena sekolah-sekolah yang mendapat jatah beasiswa dan DBO pada umumnya mempunyai murid-murid dari keluarga yang kurang mampu (berasal dari orang tua yang mempunyai pekerjaan buruh, petani penggarap, pekerja tidak tetap, tukang)
3. Para pengungsi Maluku di Sulawesi Utara pada umumnya sudah tidak mau lagi kembali ke daerah asalnya karena merasa trauma atas kejadian yang menimpa pribadi, keluarga, dan harta bendanya karena itu diperlukan dana khusus untuk beasiswa siswa kurang mampu yaitu sebesar dua kali lipat dari dana beasiswa saat ini dan tunjangan bagi guru pengungsi sebesar jumlah gaji yang mereka peroleh di tempat asalnya. Usulan : bantuan tersebut diberikan setidaknya selama 6 bulan dan dapat dihentikan apabila keluarga mereka sudah mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan dapat diteruskan apabila belum mendapatkannya. Sekolah-sekolah yang menampung siswa pengungsi dapat diberikan DBO sesuai dengan jumlah siswa yang ada atau sesuai dengan DBO bagi sekolah miskin.
4. Penanganan pengungsi Maluku di Sulawesi Utara seharusnya diselesaikan secara komprehensif dengan melibatkan LSM dan organisasi keagamaan dengan menggalang dana dan manajemen pengungsi yang lebih profesional, terbuka dan akauntebel, karena sampai

kegiatan ini dibuat pengungsi masih saja berdatangan.

Lampiran I :

Daftar lampiran

- 1). Memo Laporan
- 2). Peta Maluku Utara

Memo Survey Pengungsi

Topik : Respons Manajemen SGP terhadap pengungsi di Manado dan Bitung

Lokasi :

- Gedung eks Diklat
- Gedung Kita Waya
- SLTP Hang Tuah
- SDN 65 Pakowa/ SDN 96 Pakowa

1. Gedung Eks Diklat :

Informasi dari Pendeta Rumopa.

Pendeta Rumopa adalah Pendeta Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) yaitu gereja yang terbesar di Halmahera, Pusat Sinode GMIH di Tobelo, sedangkan pimpinan wilayah di Ternate. Pendeta Rumopa termasuk rombongan pertama yang mengungsi dari Ternate dengan Kapal Atalia. Rombongan mereka kurang lebih berjumlah 200-300 orang yang tiba di Bitung tanggal 6 Oktober 1999. Tempat penampungan pertama di Gereja Sentrum Manado, kemudian dialihkan ke Kantor BP7. Menurut Pendeta ini, pengungsi yang dari Ternate pada umumnya adalah umat Kristen yang ketakutan akibat terjadinya kerusuhan secara besar-besaran di kota Ternate. Mereka yang bukan dari Ternate berasal dari Ambon, Sangihe Talaud dan Halmahera yang beragama Kristen dikejar-kejar oleh kaum Muslim karena adanya surat selebaran yang ternyata palsu yang isinya sebagai berikut :

Orang Kristen akan menyerang orang Muslim di Ternate.

Selebaran tersebut ternyata palsu karena Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku yang dikatakan telah mengirim surat tersebut ternyata tidak pernah membuat surat tersebut, tidak ada cap gereja dan isinya sangat membingungkan. Umat Islam terprovokasi dengan selebaran tersebut dan menyerang secara membabi buta semua orang Kristen di Ternate dan membakar gedung peribadatan. Dalam keadaan panik, orang-orang tersebut mengungsi ke Sulawesi Utara.

Pertanyaan : Siapa yang menjadi provokator di Kota Ternate ?

Rupanya kerusuhan di Kota Ternate merupakan kelanjutan dari peristiwa di Kecamatan Kao. Di Kecamatan Kao ada sebuah lokasi pemukiman (transmigrasi lokal) bagi penduduk Pulau Makian (Selatan Ternate) yang dimulai sekitar 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu penduduk Pulau Makian diungsikan oleh pemerintah karena diduga akan adanya letusan gunung berapi di pulau tersebut. Mereka diungsikan ke Kecamatan Kao yaitu di desa Malifut. Oleh karena lokasi tersebut subur maka desa Malifut berkembang pesat. Di tengah-tengah lokasi pemukiman tersebut terdapat

beberapa desa yang dihuni oleh penduduk asli Kao yaitu diantaranya desa Sosol. Setelah Maluku Utara diproklamkan menjadi propinsi, maka desa Malifut oleh pemerintah akan dimekarkan menjadi kecamatan, tetapi 3 desa penduduk asli Kao di daerah tersebut tidak bersedia, karena mereka masih tetap ingin menjadi bagian dari Kecamatan Kao.

Informasi lain dari pengungsi :

Di Kecamatan Kao ada sebuah tambang Australia. Pekerja tambang tersebut sebagian besar berasal dari suku Makian dan hanya sedikit yang berasal dari suku Kao. Karena antara suku Kao sebagai penduduk asli dan suku Makian sebagai pendatang sudah ada dikotomi maka anak-anak suku Makian dan Kao sering berkelahi.

Sebagai kelanjutan daripada upaya pemisahan Kecamatan Malifut pertengahan Kao dan Malifut terus berlangsung sampai pada suatu saat ada perkelahian antara anak-anak suku Makian dan suku Kao. Karena anak-anak Suku Kao jumlahnya sedikit mereka kalah, kemudian mereka minta bantuan dari anak-anak Kecamatan Kao (baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen) untuk menyerang Malifut. Penyerangan itu dibalas oleh Suku Malifut dengan menyerang desa-desa yang berpenduduk asli Kao, diantaranya desa Sosol dan Wangeatu disertai dengan pembakaran gereja. Suku Kao mengungsi ke pedalaman dan meminta suku Malifut untuk mengganti seluruh kerugian mereka. Suatu saat penduduk Kecamatan Kao membalas menyerang Malifut dan mengusir semua pendatang. Malifut hancur dan penduduknya mengungsi dan diantaranya ada yang kembali ke Ternate. Penduduk Ternate (yang beragama Islam dan Kristen) yang tidak tahu persoalan tersebut mulai dibakar oleh provokator bahwa ada pertentangan antara Islam dan Kristen. Penduduk Ternate sebagian besar beragama Islam dan berasal dari Makian. Puncak kerusuhan muncul pada tanggal 6 November yang disebabkan oleh adanya selebaran palsu di atas yang berisikan seakan-akan gereja yang meminta umat Kristen untuk menyerang umat Islam di Ternate. Umat Islam lalu menyerang umat Kristen. Yang sangat disesalkan oleh pengungsi adalah pemerintah/aparat keamanan tidak memberikan pertolongan kepada orang Kristen yang jelas-jelas di depan mata di kejar-kejar oleh kaum Muslim.

Para pengungsi bergerak ke arah utara dan dengan pertolongan aparat keamanan mengungsi ke Bitung melalui KM Atalia dan KM Kota Teratai. Sampai survey ini diadakan pengungsi terakhir yang belum lama tiba berjumlah 2 keluarga dari Morotai yaitu kepala keluarganya bekerja sebagai mantri dan guru.

Menurut pengungsi, mereka mengalami trauma yang berat karena sanak familinya banyak di bunuh, harta benda lenyap, padahal mereka tidak bersalah sehingga mereka tidak berniat untuk kembali ke Ternate dan lebih suka tinggal di Sulut.

Saat ini pemerintah telah merencanakan para pengungsi untuk mengikuti transmigrasi lokal di Kecamatan Poigar. Tapi informasi yang beredar di kalangan pengungsi adalah bahwa

mereka akan ditransmigrasikan di Kecamatan Boalemo. Jumlah pengungsi yang masih berusia sekolah adalah :

SD	:	64	orang perempuan
		37	orang laki-laki
SLTP	:	29	orang
SMK	:	8	orang
SMU	:	31	orang
Jumlah	:	169	orang

2. SD Inpres 65 Pakowa

Jumlah murid di sekolah ini berjumlah 70 orang siswa. Sekolah ini tidak menerima beasiswa dan DBO karena memang jumlah murid kurang, sehingga sekolah tidak mengalami kesulitan walaupun tidak semua murid memakai seragam dan sepatu dan perlengkapan alat tulisnya masih kurang. Bantuan untuk sekolah diberikan oleh gereja, masyarakat dan pribadi. Ada kurang lebih 10 orang anak yang tidak memiliki sepatu dan anak-anak pengungsi yang bersekolah di sini sering tidak masuk sekolah karena sakit. Kepala Sekolah adalah Ibu A. Tumbelaka Suoth dan yang diwawancarai adalah Hatifa Lalaro dan N. Pesik juga seorang guru yang merupakan pengungsi asal Ternate yaitu P.F. Versteegh yang telah mengajar di SD ini dan telah menerima gaji seperti biasa. Menurut guru ini, dia dapat bekerja di SD ini dengan cara melaporkan diri ke Kanwil Diknas dan setelah itu langsung bertugas. Keterangan kehadirannya dikirimkan ke Ternate (sekolah asal) dan berdasarkan keterangan tersebut gajinya dikirimkan (detasering).

SD 96 Pakowa, menampung anak pengungsi usia sekolah.

Jumlah pengungsi Ternate 33 orang. Sekolah ini juga tidak mendapat beasiswa dan DBO. Memang sekolah ini cukup bagus dan halamannya luas, tapi dengan ketambahan anak-anak pengungsi sekolah mengalami kesulitan. Guru-guru juga sudah berusaha membantu anak-anak pengungsi.

3. Gedung Wanita Kita Waya

Yang diwawancarai adalah M. Minggus, guru SLTP 2 Ternate. Guru tersebut sejak menungsi belum pernah menerima gaji dan belum bekerja/kembali ke sekolah. Jumlah pengungsi 890 orang, anak sekolah 162 siswa, dan mahasiswa 7 orang. Mereka bersekolah di SD GMIM 48 berjumlah 112 orang, sedangkan di SLTP 13 Paniki, SLTP Pertiwi dan SLTP Hang Tuah 37 orang dan sisanya di SMU 8, SMK 2 dan SMK 1. Dalam hal pengadaan seragam pada awalnya mereka tidak mempunyainya, tapi kemudian walaupun mendapat bantuan dari jemaat/gereja sampai saat ini belum semua anak mendapat seragam, jadi sampai saat ini ada anak yang ke sekolah tidak memakai seragam. Begitu juga dengan minimnya alat tulis-menulis.

Salah seorang pengungsi adalah seorang istri TNI yang mengungsi dari asrama tentara karena menurut informasi semua orang Kristen akan dibunuh/dibantai. Menurut ibu ni, dia tidak akan kembali ke Ternate tapi ke Ambon.

Kebutuhan makanan di lokasi pengungsian baik di Kita

Waya maupun di BP7 cukup, hanya lauk-pauk yang kurang karena biaya dari Pemda tidak mencukupi. Pada saat survey ini dilakukan ada bantuan dari LVRI. Di dinding terdapat papan yang menuliskan daftar para penyumbang yang setiap harinya bertambah. Walaupun banyak penyumbang, persediaan lauk pauk di lokasi pengungsian seringkali kurang karena jumlah pengungsi yang banyak.. Salah seorang pengungsi yang bernama George Dalamir adalah seorang Mantri yang mengungsi bersama istri dan 4 orang anaknya pada saat tiba di Manado langsung bekerja sesuai profesinya yaitu sebagai mantri terhadap 6 orang korban tertembak (4 meninggal, 2 masuk rumah sakit) akibat kerusuhan Morotai. Keadaan yang dialami pengungsi secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Mengalami trauma, yaitu pada saat kerusuhan dikejar-kejar untuk dibunuh.
- Kehilangan harta benda
- Rasa takut karena akan dibunuh.
- Gereja sebagai simbol iman dan tempat perlindungan dibakar sehingga kebebasan beribadah tidak ada lagi.

Untuk menyelamatkan diri, mereka terpaksa menjual harta bendanya atau menggadaikannya untuk biaya transportasi dengan menggunakan kapal laut atau pesawat (Hercules). Menurut informasi dari para pengungsi aparat keamanan sering membiarkan pembantaian terhadap orang Kristen walupun itu terjadi di depan mata mereka (sayang sekali tidak ada pengungsi yang beragama Islam sehingga sulit mendapatkan informasi sebagai counter check dari yang beragama Islam).

Seminggu sebelum survey dilakukan para pengungsi telah didatangi oleh Komnas HAM Jakarta tapi informasi yang diminta hanya mengenai kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian pengungsi bukan sebab terjadinya kerusuhan.

Kesimpulan :

- Penyebab kerusuhan di Ternate yang mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsi secara besar-besaran mencapai 17.941 orang dalam beberapa tahap disebabkan karena :
 - Trasmigrasi lokal suku Makian ke Kecamatan Kao yang tidak disertai dengan sosialisasi diantara sub etnis, sehingga meskipun secara fisik suku Makian mengalami kemakmuran, tapi secara budaya tidak terjadi integrasi antara suku Makian dan suku Kao sehingga dikotomi pendatang dan penduduk asli terus dipertentangkan sampai merebak menjadi pertentangan fisik horisontal.
 - Pemekaran propinsi dari kecamatan selalu dibayangkan oleh kepentingan suku dan agama, bukan untuk kepentingan bersama. Penduduk asli merasa lebih berhak (suku Kao terhadap suku Makian di Malifut) dan suku Makian terhadap pendatang di Ternate. Oleh ulah Provokator keadaan ini diperuncing dengan masalah agama yang sebelumnya terjaga dengan baik, baik di Halmahera maupun di Maluku Utara.
- Jumlah pengungsi asal Maluku 17.941 orang dan yang

menjadi tanggungan Pemda Sulut 6.157 orang. Para pengungsi ini ditampung di sejumlah tempat. Di Bitung para pengungsi yang ditempatkan di Dodik Secata B berjumlah 1.438 orang, lalu Makodim 1310 Bitung 654 orang, PT Mega Belia berjumlah 1.749 orang dan asrama Polisi Pinokaian Bitung berjumlah 282 orang. Di Manado para pengungsi ditempatkan di Pakowa yaitu di ex Kantor BP7 berjumlah 619 orang, gedung Kita Waya Kairagi berjumlah 890 orang, kantor desa Malalayang Dua berjumlah 42 orang dan 2 orang di Kantor BPU. Selain itu terdapat pula 2 lokasi pengungsi di Minahasa yaitudi Lota Pineleng berjumlah 105 orang dan GMIM Kawangkoan 129 orang. Sementara di Satal berjumlah 247 orang.

3. Sekolah-sekolah yang didatangi oleh pengungsi tidak mendapat beasiswa dan DBO karena alokasi telah ditetapkan pada Bulan Agustus, sedangkan para pengungsi berdatangan pada bulan Oktober. Sekolah-sekolah dengan terbuka menerima anak-anak pengungsi dan berupaya memberikan pelayanan yang sebaik baiknya.

Tingkat absensi yang sangat tinggi disebabkan oleh kesehatan yang sering terganggu dan keadaan di tempat pengungsian yang tidak selayaknya (tidak seperti di rumah sendiri).

4. Manajemen lokal SGP yang di temui yaitu Kepala Bidang Dikmenum, manajer-manajer Komite Dati II dan Ketua Bappeda Tingkat I menyimpulkan bahwa sulit menyalurkan dana beasiswa kepada pengungsi usia sekolah karena anak-anak yang menerima beasiswa juga berkekurangan (anak-anak pra sejahtera). Apabila mereka mencoba mengalokasikan kepada anak-anak tersebut, maka ada kesan pilih kasih dan bisa saja muncul kecemburuan sosial dari anak-anak penduduk asli sehingga anak-anak pengungsi bisa tidak disukai, tapi manajemen lokal meyakini bahwa apabila ada siswa penerima beasiswa yang DO atau kesalahan alokasi dana DBO dapat diprioritaskan untuk diberikan kepada siswa pengungsi atau sekolah-sekolah penerima pengungsi.

Rekomendasi :

1. Semua siswa pengungsi nampaknya belum ada tanda-tanda untuk kembali ke tempat asalnya dan lagi upaya pemerintah untuk melaksanakan transmigrasi lokal masih memerlukan waktu yang panjang oleh karena itu semua siswa pengungsi diusulkan mendapat beasiswa yang jumlahnya sama dengan jumlah penerima beasiswa untuk penduduk asli (supaya tidak ada kecemburuan sosial).
2. Sekolah-sekolah yang menerima siswa pengungsi dalam jumlah tertentu diberikan DBO paling banyak sama dengan DBO yang ada, misalnya sampai dengan 50 orang pengungsi sekolah tersebut menerima dana DBO 50% dan diatas 50 orang menerima 100% dari jumlah dana DBO yang ada.
3. Guru-guru diinventarisasi dan diprioritaskan untuk

bekerja kembali dan mengajar di sekolah-sekolah yang mempunyai siswa pengungsi. Gaji mereka dibayar seperti biasa dengan prosedur administrasi detasering.

Memo

Rabu, 8 Maret 2000

1. SD GMIM 48

Guru : Sintje Giroth, Wali kelas 2.

Jumlah siswa pengungsi 18 tambah siswa biasa 40 sehingga menjadi 58 siswa (kelas-2).

Seragam : Tidak semua siswa datang dengan pakaian seragam ada yang hanya pakai kaos. Pada umumnya tidak layak pakai. Tidak semua pakai sepatu ada yang hanya pakai sandal. Ada sepatu yang sudah tidak layak pakai. Alat tulis-menulis diusahakan oleh guru kadang-kadang diberi pensil bekas. Kepala sekolah selalu menganjurkan agar anak sekolah diperlakukan sebagai keluarga sendiri. Jadi hubungan anak-anak cukup akrab, kadang-kadang kalau mereka membeli kue dibagi juga untuk anak pengungsi. Anak pengungsi tidak dikenakan uang sekolah maupun uang cawu. Di sekolah ini ada juga guru pengungsi, perempuan dan laki-laki. Mereka datang dengan pakaian apa adanya tetapi sudah ada nota dinas dari Kandep. Guru mengakui bahwa anak-anak cukup manis tapi ada juga yang nakal dan sering menyulitkan guru kelas. Karena kelasnya menjadi besar guru kelas mengaku sering berteriak kalau kelas gaduh.

2. SMU 8 Kairagi

Wakil Kepala Sekolah : Drs.W. Panambunan.

Pengungsi yang datang di sekolah ini masuk secara bertahap dan sekarang telah berjumlah kira-kira 42 orang. Pada umumnya anak-anak baik. Pakaian seragam, sepatu dan ATM diminta dari siswa yang berkelebihan, tapi semuanya serba minim dan tidak layak. Sekolah ini juga mendapat beasiswa yaitu sebanyak 26 orang dan sudah menerima pada tahap I. Sekolah ini juga mendapat DBO. Seorang anak penerima beasiswa bernama Mahmud mengakui bahwa ia sangat memerlukan uang beasiswa tersebut jadi ia tidak rela kalau uang beasiswa itu diberikan kepada anak pengungsi (anak lain). Wakil Kepala Sekolah mengusulkan agar anak-anak pengungsi diberikan uang beasiswa dan DBO. Anak-anak kelas III mendapat masalah lebih parah lagi karena mendapat program pengayaan. Mereka datang dengan sarapan apa adanya (mungkin juga tidak) sampai di sekolah masih harus menambah jam tambahan padahal untuk uang jajan sangat minim (bahkan tidak ada sama sekali). Jarak antara sekolah dan tempat pengungsi kira-kira 45 menit jadi sampai di sekolah sudah kelelahan.

3. SLTP 13 Manado

Kepala Sekolah : Drs. Anwar Panawar

Jumlah siswa pengungsi 60 orang. Siswa dibagi rata di semua kelas dan diperlakukan sama sehingga tidak ada

pengaruh apa-apa. Anak-anak menerima siswa pengungsi sebagai saudaranya sendiri. Sedangkan sepatu dan ATM sangat minim karena itu Kepala Sekolah mengambil inisiatif meminta bantuan dari Gubernur untuk 6 bulan. Ada juga guru pengungsi sebanyak 6 orang. Sekolah ini mendapat beasiswa 35 orang dan DBO. Penggunaan DBO tahap I disesuaikan dengan proposal yang telah dibuat, jadi belum berdampak langsung terhadap kepentingan siswa pengungsi. Untuk Tahap II kepala sekolah akan mengusulkan kepada Komite Sekolah untuk mengalokasikan juga untuk kepentingan anak-anak pengungsi, tetapi hal ini harus dilakukan dengan arif bijaksana karena di sekolah ini ada 2 kalil lipat anak kurang mampu dari jumlah yang mendapat beasiswa. Bisa jadi ada kecemburuan sosial. Menurut Kepala Sekolah bantuan anak pengungsi maksimal 1 tahun saja, Pemda dan pengungsi sendiri harus memikirkan bagaimana bisa menjadi mandiri dan tidak menjadi beban untuk orang lain.

Kamis, 9 Maret 2000

Dodik Bitung Barak 8

Jumlah jiwa 244 jiwa (63 KK) Jumlah siswa sekolah SD 30 orang, SLTP 15 orang, SMU 21 orang. SDN I Girian, SLTP 1 Girian, SMU 1 Girian. Koordinator pengungsi Bapak Agus Watunglawar SH. Seragam : seragam, sepatu dan alat tulis minim. Saat ini bantuannya mulai habis. Makanan : untuk makan pengungsi disediakan dapur umum yang memakai jam, sehingga anak yang akan ke sekolah harus memasak sendiri (orang tuanya) dengan demikian harus mengupayakan bahan makanan sendiri. Stok beras tinggal 6 hari. Anak tidak punya tempat belajar khusus. Meskipun lampu cukup terang dan tempat cukup bersih tetapi mereka tidak dapat belajar dengan tenang. Kalau ada anak yang sakit harus dibawa ke rumah sakit umum (bebas) tetapi tempatnya jauh (2 kali naik kendaraan umum) yang dekat adalah rumah sakit swasta (Katolik) tetapi harus membayar. Para pengungsi tidak ingin kembali ke Ternate karena trauma dikejar-kejar untuk dibunuh, rumah mereka dibakar. Para pengungsi juga ingin segera mendapat tempat tinggal tetap apakah transmigrasi lokal atau dibagi ke desa-desa (tiap desa 2-3 KK). Saat ini para pengungsi bekerja sama dengan PT Camar Sapta Ganda pimpinan Jonatan Tanos untuk menyediakan perumahan sederhana bagi pengungsi Pegawai Negeri.

SLTPN 1 Bitung.

Kepala Sekolah : Drs. Pesak.

Jumlah siswa 1052 orang terdiri dari 9 kelas. Jumlah pengungsi 152 orang. Kepada mereka tidak dipungut biaya apa-apa. Belum lama ini untuk ulangan cawu bagi siswa pengungsi telah dikeluarkan 10 rim kertas. Di sekolah ini ada 5 guru pengungsi, 3 laki-laki 2 perempuan. Sekolah mereka dengan senang hati menerima karena kebetulan kurang tenaga guru. Seragam dan ATM sangat minim, guru dan siswa membantu apa adanya. Guru ada yang sudah terima gaji ada yang belum.

Guru pengungsi setiap datang diberi transport Rp. 1.000,-. Siswa penerima beasiswa 10 orang dan juga menerima DBO. Penggunaannya sesuai dengan proposal yang dibuat. Kepala Sekolah mengusulkan agar DBO ditambah untuk pengungsi karena banyak anak kurang mampu, seperti anak nelayan, petani penggarap dan guru, buktinya sampai Maret 2000 baru 30% yang lunas uang sekolah. Wawancara dengan Ibu Waani Mahmud dari Kelas 3.3. sebagian besar anak-anaknya rajin dan suka sekolah bahkan ada yang pintar. Tetapi ada juga beberapa yang nakal (suka bolos) sehingga tingkat absensi tinggi. Anak pengungsi yang bolos biasanya bergerombol di antara siswa pengungsi. Hal ini tidak biasa terjadi bagi siswa SLTP 1. Sekarang guru-guru hampir tidak punya kursi, karena digunakan untuk siswa. Jadi perlu DBO untuk para siswa pengungsi tersebut (pada saat yang sama kami bertemu dengan Komite Kota Bitung, 2 orang yang bertugas memantau Bitung di 10 lokasi). Jumlah transport Rp. 25.000,- dirasa sangat minim, apakah kasusnya sama seperti Gorontalo yang tidak dibenarkan menerima Lumsum? SMU 1 Girian.

Kepala Sekolah : Drs. Mintjelungan

Humas : Arifin Ani

Jumlah siswa pengungsi 106 orang dari 748 orang pengungsi. Berikut ini daftar jumlah siswa dan jumlah siswa pengungsi menurut kelas di SMU 1 Girian :

Kelas	Jumlah siswa		Jumlah siswa pengungsi	
	L	P	L	P
I	156	148	27	11
II	125	155	20	14
III	120	144	26	8

Sekolah ini mendapat DBO dan Beasiswa sebanyak 88 orang sedangkan siswa kurang mampu berjumlah 137 orang. Siswa pengungsi pada umumnya tidak mempunyai seragam sekolah atau datang dengan memakai pakaian apa adanya demikian juga dengan sepatu dan alat tulis menulis.

Penggunaan DBO di sekolah ini disesuaikan dengan proposal yaitu antara lain pengadaan buku kontrol siswa (Cawu 3). Sudah ada kontribusi nyata penggunaan DBO/Beasiswa terhadap siswa pengungsi.

Di kota Bitung belum ada edaran tentang kebijaksanaan pengungsi tapi dalam rapat staf di Kandep Diknas, sudah pernah disinggung tentang keberadaan pengungsi supaya bisa diterima sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada.

Di sekolah ini juga ada guru pengungsi sebanyak 7 orang

sedangkan jumlah guru tetapnya 47 orang sehingga keseluruhan guru yang berada di sekolah ini berjumlah 54 orang guru. Kebijakan Kepala Sekolah untuk siswa pengungsi yaitu ditempatkan secara acak di tiap-tiap kelas, jadi karena kelas menjadi besar jumlahnya sehingga diadakan penataan kelas kembali. Jumlah kelas yang semula berjumlah 17 bertambah menjadi 20 kelas dengan dibagi menjadi kelas pagi dan sore. Dengan demikian siswa pengungsi merasa diperlakukan seperti siswa biasa dan siswa setempat juga memberikan kepedulian yang tinggi sehingga mereka mudah beradaptasi.

VI. Gerakan Dompok Peduli

Secara sukarela siswa-siswa setempat dengan dimotori oleh OSIS mengadakan upaya pengumpulan dana melalui 'Gerakan Dompok Peduli', dimana uang yang dikumpulkan tersebut dibagikan kepada siswa-siswa pengungsi sebagai uang transpor dan uang jajan. Pada kesempatan ini pemantau mengadakan wawancara dengan guru kelas dan siswa pengungsi yaitu :

Siswa pengungsi :

1. Agustince Sumie (Kelas 26)
2. Yulita Masimin (Kelas 26)
3. Edison Taliwau (Kelas 3 Sos)
4. Arte Milote (Kelas 3 IPA2)

Seorang siswa berasal dari SMU Eben Haezar Ternate mengatakan bahwa sekolah asalnya tersebut sekarang sudah terbakar dan rata dengan tanah.

Siswa-siswa pengungsi mendapat seragam dari sekolah. Tempat pengungsian terletak di Dodik dan ada juga di pabrik rotan (Mega Surya). Pada umumnya anak-anak ini tidak pernah sarapan jika akan ke sekolah karena dapur umum belum dibuka pada pagi hari saat mereka berangkat ke sekolah.. Mereka juga tidak bisa belajar dengan tenang di tempat pengungsian selain karena lampu yang kurang terang, juga karena suasana yang ribut di lokasi pengungsian tersebut. Tapi mereka tetap mempunyai kamauan yang keras untuk bisa menyelesaikan sekolahnya.

Kepala Sekolah (Drs. Mintjelungan)

Sangat dirasakan kontribusi DBO terhadap anak-anak pengungsi karena dari jatah rutin kantor tidak ada jatah untuk mereka. Dana yang didapat dari DBO dan dana rutin saat ini sudah tidak lagi mencukupi untuk membiayai sekolah mengingat harga barang-barang yang naik, misalnya kertas yang dulunya Rp. 9.000 sekarang sudah menjadi Rp. 20.000/rim.

Kehadiran guru-guru pengungsi di sekolah ini dirasakan sangat membantu karena kebetulan para guru ini berasal dari bidang studi yang diperlukan (bidang studi Matematika, Fisika, Biologi, Kesenian). Untuk guru-guru pengungsi diberikan tunjangan khusus dan uang transpor setiap kali datang ke sekolah. Keadaan guru juga sangat menyedihkan, mereka mengajar dengan memakai pakaian yang ala kadarnya saja.

Usulan :

1. Beasiswa untuk 106 anak pengungsi jika boleh diberikan 2 kali lipat dari jatah anak kurang mampu dan tunjangan untuk guru-guru pengungsi diberikan minimal sebanyak jumlah gaji yang diperoleh mereka seperti pada tempat asalnya, karena sebagian besar dari mereka sampai saat ini belum menerima gaji. Beasiswa untuk anak-anak dan tunjangan untuk guru pengungsi selama 6 bulan mulai Tahun Ajaran baru dan dapat diperpanjang apabila masih diperlukan.
2. Oleh karena kebanyakan dari para pengungsi termasuk didalamnya guru-guru dan siswa tidak mau kembali ke daerah asalnya, supaya dipikirkan penyelesaian masalah pengungsi secara tuntas, apakah akan ditempatkan di suatu tempat atau mereka dibebaskan untuk memilih/mencari lokasi pemukiman di desa-desa Minahasa, Manado maupun Bitung.
3. Komite Kecamatan, Kota dan Provinsi belum mengambil langkah-langkah antisipatif mengenai pengungsi di Sulut yang sampai saat ini masih berdatangan.